

ABSTRAK

Pembangunan dalam suatu negara merupakan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya PBB telah lama diterapkan dan usaha tersebut bukan pekerjaan yang mudah. Salah satu untuk meningkatkan penerimaan PBB maka dibentuklah tim intensifikasi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah ada peranan intensifikasi perpajakan terhadap penerimaan PBB. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bojonagara Bandung.

Bentuk intensifikasi yang telah dilakukan KPP Bojonagara yaitu pelaksanaan pekan panutan, operasi sisir, surat himbauan, dan penagihan aktif. Untuk mengetahui besarnya peranan intensifikasi perpajakan terhadap penerimaan PBB dapat dilihat dari sampelnya yaitu berupa data STTS yang dianggarkan, SPPT, STTS yang dibayar, Penerimaan PBB, STTS yang menunggak, dan penerimaan PBB yang menjadi tunggakan. Sampel tersebut diambil tahun 2007 dan 2008. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda hipotesis deskriptif analisis dengan menggunakan statistik non-parametrik dengan menggunakan uji Wilcoxon. Berdasarkan pengujian Wilcoxon, peranan Intensifikasi perpajakan sangat berperan terhadap penerimaan PBB. Besarnya peranan intensifikasi perpajakan dapat dilihat dengan menggunakan cara manual yaitu jumlah STTS dibayar yaitu sebesar 7,97 %, penerimaan PBB Sebesar 43,79%, penurunan STTS yang menunggak sebesar -6,35%, penurunan penerimaan PBB yang menunggak yaitu sebesar -8,40%

Kata kunci : intensifikasi Pajak, pekan panutan, oprasi sisir, surat himbauan dan penagihan aktif, penerimaan PBB.

ABSTRACT

Development in a country is the ongoing activities that have a goal to continually establish and improve the welfare of a society. Efforts to achieve these objectives one through Land and Building Tax (PBB). Efforts to increase state revenues, especially PBB has long been applied and the business is not an easy job. One to improve the land and building tax receipts, the intensification of the team was formed. This research was conducted to see if there is intensification of the role of taxation on land and building tax receipts. This research is a case study at the tax office Pratama (KPP) Bandung Bojonagara.

Form of intensification that has been done KPP Bojonagara, the course of the weekend was a role model, operating combs, letter of appeal, and active collection. To know the level of intensification of the role of taxation on land and building tax receipts can be seen from the sample that is data STTS budgeted, SPPT, STTS paid, Land and building tax receipts, STTS is delinquent, and receipt tax on land and buildings that become delinquent. Samples were taken in 2007 and 2008. To test This research was done using descriptive analysis method, the hypothesis using non-parametric statistics using the Wilcoxon test. Based on the Wilcoxon test, the role of taxation is very important to the intensification of land and building tax receipts. The amount of intensification of the role of taxation can be viewed by using the manual method STTS amount paid is equal to 7.97%, 43.79% amount of revenue forecasting, STTS decrease of -6.35% is delinquent, the decline in acceptance of UN arrears that is equal to -8, 40%

Keyword: intensification of Taxation, weekend was a role model, operating combs, letter of appeal and an active billing, land and building tax receipts.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR	
LAMPIRAN.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Identifikasi Masalah.....	7
1.3	Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	8
1.4	Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan.....	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	10
2.1.1.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	11
2.1.1.3 Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
2.1.1.4 Pengecualian Pengenaan PBB.....	16
2.1.1.5 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
2.1.1.6 Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak.....	26
2.1.1.7 Nomor Obyek Pajak.....	27
2.1.1.8 Tarif Pajak.....	29
2.1.1.9 Nilai Jual Obyek Pajak.....	29
2.1.1.10 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.....	30
2.1.1.11 Nilai Jual Kena Pajak.....	30
2.1.1.12 Penghitungan Pajak Terutang.....	32
2.1.1.13 Dasar Penagihan PBB.....	33
2.1.1.14 Tahun Pajak.....	34

2.1.1.15 Pembayaran PBB.....	34
2.1.1.16 Sanksi Atas Keterlambatan Pembaran PBB.....	35
2.1.1.17 Penerimaan PBB.....	36
2.1.2 Intensifikasi Perpajakan.....	36
2.1.2.1 Pengertian Intensifikasi.....	36
2.1.2.2 Fungsi Intensifikasi.....	37
2.1.2.3 Strategi Intensifikasi Pajak.....	39
2.2 Kerangka Pemikiran.....	42
2.3 Hipotesis.....	47
BAB III METODA PENELITIAN.....	48
3.1 Obyek Penelitian.....	48
3.1.1 Gambar Umum Kantor Pelayanan Pajak.....	48
3.2 Metoda Penelitian.....	55
3.2.1 Opeasionalisasi variabel.....	56
3.2.2 Metoda penelitian.....	59
3.2.3 Jenis dan Sumber Data.....	60
3.2.3.1 Jenis Data.....	60
3.2.3.2 Sumber Data.....	60

3.2.4 Populasi dan Sampel.....	61
3.2.5 Rancangan Pengujian Penelitian.....	62
3.2.5.1 Alat analisis.....	62
3.2.5.2 Penetapan Hipotesis.....	63
3.2.5.3 Pengujian Terhadap Hipotesis.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1 Penetapan PBB.....	67
4.2 Pembayaran PBB.....	69
4.3 Bentuk Intensifikasi PBB Yang Dilakukan	
KPP Bojonagara.....	70
4.4 Prosedur pelaksanaan intensifikasi Perpajakan	
Pada KPP Bojonagara.....	71
4.4.1 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan PBB.....	73
4.5 Hambatan-Hambatan dalam Melakukan intensifikasi.....	85
4.6 hasil pengujian Analisis Wilcoxon.....	86
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	93
5.2 Saran.....	94

Daftar pustaka.....	95
Daftar Lampiran.....	96
Daftar Riwayat Hidup.....	112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Bojonagara.....	50
Gambar 4.1 Tata Cara Penagihan Aktif.....	84

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Definisi Operasionalisasi Variabel.....	57
Tabel 4.1 Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 1.....	86
Tabel 4.2 Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 2.....	87
Tabel 4.3 Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 3.....	88
Tabel 4.4 Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 4.....	88
Tabel 4.5 Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 5.....	89
Tabel 4.6 Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 6.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat penelitian Kantor Wilayah Jawa Barat I.....	96
Data Penerimaan PBB Tahun 2007.....	97
Data Penerimaan PBB tahun 2008.....	98
Surat Edaran Jenderal Pajak Tentang Kebijakan Penagihan Pajak.....	100
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB.....	109
Surat Tanda Terima Setoran	110
Surat penelitian KPP Pratama Bojonagara.....	111